

Segmentasi Pemilih Moderat dan Tradisional: Peta Elektoral PKS Provinsi Maluku 2024

Muhtar¹, Mukhlis Fataruba², Rukoyah³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura^{1,2,3}

*Email Korespondensi: muhtartispunpatti@gmail.com

Diterima: 12-10-2025 | Disetujui: 22-10-2025 | Diterbitkan: 24-10-2025

ABSTRACT

The General Elections Commission (KPU) recapitulation (March 19, 2024) placed PAN as the winner of the most votes in the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from the Maluku electoral district (178,770), followed by PKS (146,716) and PDI-P (145,777). This study asks: which voter segment—moderate or traditional—supported PKS's achievements, and what are the implications for the 2024 regional elections. Based on the segmentation–targeting–positioning (STP) framework and the Indonesian voter behavior literature, we formalize two constructs: the moderate segment (response to issues–performance–accountability) and the traditional segment (social–religious networks, local figures, culturally valuable services). The explanatory sequential mixed method design (quantitative → qualitative) anchors the analysis on official KPU data, accompanied by a proposed Moderate Index (IM) and Traditional Index (IT) for mapping per sub-district/urban village. The results show that PKS's best performance occurs when value politics meets network politics: in the high IM corridor, differentiation is determined by concrete policy language and public accountability; in the high IT corridor, the rhythm of da'wah (preaching) and social gatherings, rooted figures (including women), and cultural service packages secure votes. The decline in provincial DPRD seats indicates inefficient vote conversion due to thin distribution and the lack of anchor figures in several traditional pockets. Practical implications: STP orchestration based on the IM-IT map, focusing on "last seat" polling stations, and meso channels to bridge issues and services ahead of the 2024 regional elections.

Keywords: voter segmentation; STP; PKS; Maluku; moderate voters; traditional voters; value politics; network politics; 2024 regional elections; 2024 General Elections Commission (KPU)

ABSTRAK

Rekapitulasi KPU (19 Maret 2024) menempatkan PAN sebagai peraih suara terbanyak DPR RI dari Dapil Maluku (178.770), diikuti PKS (146.716) dan PDI-P (145.777). Studi ini menanyakan: segmen pemilih mana—moderat atau tradisional—yang menopang capaian PKS, dan apa implikasinya bagi Pilkada 2024. Berbasis kerangka segmentation–targeting–positioning (STP) dan literatur perilaku pemilih Indonesia, kami memformalkan dua konstruk: segmen moderat (respon pada isu–kinerja–akuntabilitas) dan segmen tradisional (jejaring sosial–keagamaan, figur lokal, layanan bernilai budaya). Rancangan metode explanatory sequential mixed (kuantitatif → kualitatif) menambatkan analisis pada data resmi KPU, disertai usulan Indeks Moderat (IM) dan Indeks Tradisional (IT) untuk pemetaan per kecamatan/kelurahan. Hasil menunjukkan performa terbaik PKS muncul saat value politics bertemu network politics: di koridor IM tinggi, diferensiasi ditentukan oleh bahasa kebijakan konkret dan akuntabilitas publik; di koridor IT tinggi, ritme dakwah–silaturahmi, figur berakar (termasuk perempuan), dan paket layanan budaya mengunci suara. Penurunan kursi DPRD provinsi mengindikasikan inefisiensi konversi suara karena sebaran tipis dan kurangnya figur jangkar pada beberapa kantong tradisional. Implikasi praktis: orkestrasi

STP berbasis peta IM–IT, fokus TPS “kursi terakhir”, dan kanal meso untuk menjembatani isu dan layanan menjelang Pilkada 2024.

Kata kunci: segmentasi pemilih; STP; PKS; Maluku; pemilih moderat; pemilih tradisional; value politics; network politics; Pilkada 2024; KPU 2024

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhtar, Mukhlis Fataruba, & Rukoyah. (2025). Segmentasi Pemilih Moderat dan Tradisional: Peta Elektoral PKS Provinsi Maluku 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1434-1448. <https://doi.org/10.63822/c5na2081>

PENDAHULUAN

Rekapitulasi nasional KPU pada 19 Maret 2024 menempatkan PAN sebagai peraih suara terbanyak DPR RI dari Dapil Maluku (178.770 suara), diikuti PKS (146.716) dan PDI-P (145.777). Komposisi tiga besar ini yang diumumkan dalam pleno KPU RI dan dilaporkan media arus utama pada tanggal yang sama menegaskan posisi PKS sebagai salah satu poros kompetisi elektoral di provinsi kepulauan tersebut sekaligus memantik pertanyaan strategis: segmen pemilih mana, moderat atau tradisional, yang menopang capaian itu, dan bagaimana implikasinya bagi kontestasi berikutnya (Pilkada 2024) (KPU RI, 19 Maret 2024; DetikNews, 19 Maret 2024).

Secara teoretik, pemasaran politik menempatkan kerangka *segmentation–targeting–positioning* (STP) sebagai tulang punggung strategi kampanye. Smith dan Hirst menunjukkan bahwa segmentasi strategis memungkinkan partai menstrukturkan sumber daya secara lebih efisien, mempersonalisasi pesan, dan memetakan “pasar politik” ke dalam klaster pemilih yang relatif homogen untuk ditangani dengan bauran taktik yang berbeda—mulai dari penawaran kebijakan, penokohan kandidat, hingga pemilihan kanal komunikasi—serta menjadi prasyarat bagi praktik micro-targeting berbasis data yang kini jamak diadopsi partai modern ([Smith & Hirst, 2001](#)). Dalam demokrasi elektoral Indonesia, lanskap ini berkelindan dengan temuan bahwa ideologi dan klientelisme hidup berdampingan. Di satu sisi, representasi ideologis tetap terbaca bahkan dalam konteks patronase sehingga partai dan legislator tidak sepenuhnya “tuli” terhadap preferensi kebijakan pemilih ([Fossati dkk., 2020](#); [Aspinall & Sukmajati, 2017](#)). Di sisi lain, strategi *vote-buying* yang bertumpu pada broker personal dan jejaring sosial memperlihatkan daya tahan dukungan berbasis relasi dan timbal-balik yang sangat lokal dan berbasis komunitas ([Aspinall & Sukmajati, 2017](#)). Kombinasi bukti ini memberi pijakan analitis untuk membedakan segmen moderat yang cenderung responsif pada isu dan kinerja, dari segmen tradisional yang lebih dipengaruhi jejaring, figur, dan layanan.

Pada poros politik keislaman, temuan lintas-wilayah terbaru mengindikasikan adanya “ambang 30%” bagi partai Islam pada tingkat nasional; kenaikan dukungan sangat terkait dengan komposisi kelas menengah yang tumbuh dan preferensi berbasis agama, sehingga partai Islam didorong memperluas *appeal* ke pemilih non-inti dan menegaskan narasi kebijakan universal ([Utami, Prasetyantoko, & Putra, 2024](#)). Secara paralel, studi mengenai orientasi politik kiai NU menunjukkan pola pragmatis-kesalehan: dukungan politik tidak otomatis linier dengan garis organisasi, tetapi sangat dipengaruhi konteks lokal, reputasi figur, serta relasi pelayanan sosial ([Yani, Husnaini, & Eka, 2022](#)). Dua rumpun temuan tersebut relevan untuk membaca PKS—yang secara historis menggabungkan citra “bersih-melayani” dan jejaring dakwah ketika beroperasi di dua arena sekaligus: pemilih moderat urban yang menuntut integritas dan *deliverables* layanan publik, serta pemilih tradisional yang bergerak melalui otoritas agama/komunitas dan patronase sosial.

Riset perilaku pemilih Indonesia juga menempatkan kepemimpinan, identitas partai, dan persepsi kinerja sebagai determinan penting pilihan politik—sering kali lebih kuat ketimbang satu faktor sosiologis tunggal—dengan penekanan pada evaluasi kinerja sebagai jangkar preferensi ([Liddle & Mujani, 2007](#)). Ditarik ke konteks Maluku yang majemuk dan kepulauan, hipotesis turunannya adalah bahwa kantong pemilih moderat lebih terkonsentrasi di pusat layanan dan pendidikan seperti Ambon akan lebih peka terhadap isu harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan tata kelola antikorupsi, sedangkan kantong tradisional yang berakar pada komunitas, adat, dan otoritas keagamaan setempat akan lebih peka pada kedekatan figur lokal, intensitas kehadiran sosial, serta pola resiprositas layanan.

Meski demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang nyata. Pertama, studi terindeks yang secara spesifik memetakan segmentasi moderat vs. tradisional untuk PKS di Maluku masih minim; sebagian besar

literatur tentang partai Islam dan perilaku pemilih berfokus pada level nasional atau kawasan Jawa sehingga variasi kepulauan timur kurang tertangkap (Smith & Hirst, 2001; Fossati et al., 2020; Aspinall & Sukmajati, 2017; Utami et al., 2024; Yani et al., 2022; Liddle & Mujani, 2007). Kedua, integrasi kerangka STP dengan indikator perilaku lokal—misalnya jejaring kekerabatan/adat, otoritas keagamaan setempat, *issue salience* urban, dan jejak pelayanan figur—belum dirumuskan sebagai model operasional untuk membaca kinerja PKS pada Pemilu 2024 di Maluku. Ketiga, pasca-penetapan KPU 19 Maret 2024, belum tersedia pemetaan akademik yang mengukur kontribusi relatif dua segmen terhadap perolehan PKS (146.716 suara) dan mengartikulasikan implikasinya bagi desain kampanye Pilkada 2024, terutama pada level dapil, kabupaten/kota, dan bahkan TPS yang diperlukan untuk micro-targeting.

Artikel ini merespons celah tersebut dengan dua langkah. Pertama, penelitian memformalkan kerangka segmentasi moderat dan tradisional yang kompatibel dengan ekologi politik Maluku—plural agama, memori sosial, serta geografi kepulauan yang memperkuat komunalisme—dengan mengawinkan tradisi STP dalam pemasaran politik dan temuan empiris tentang ideologi, patronase, serta otoritas keagamaan. Kedua, penelitian menempatkan capaian PKS 2024—yakni posisinya dalam tiga besar suara DPR RI di Maluku menurut KPU sebagai jangkar deskriptif untuk menguji indikator segmentasi pada level kabupaten/kota/dapil dan merumuskan implikasi taktis menuju Pilkada 2024 (KPU RI, 19 Maret 2024; DetikNews, 19 Maret 2024).

Namun, gap penelitian ini yang secara spesifik membelah basis PKS Maluku ke dalam segmen moderat vs. tradisional nyaris belum terdokumentasi dalam publikasi terindeks. Sebagian besar riset Indonesia bertumpu pada Jawa atau level nasional, sementara evidence pada provinsi kepulauan timur, termasuk Maluku, terbatas. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi:

1. Memformalkan kerangka segmentasi (berbasis STP) untuk konteks Maluku dengan indikator operasional yang kompatibel dengan perilaku pemilih Indonesia (ideologi–kebijakan, jaringan–broker, figur–pelayanan), merujuk pada literatur pemasaran politik dan perilaku pemilih. ([Emerald+2Emerald+2](#))
2. Memetakan peta elektoral PKS 2024 di Maluku menggunakan data resmi KPU sebagai jangkar deskriptif, lalu menguji kecenderungan segmen moderat vs. tradisional pada level Dapil/kabupaten-kota melalui indikator kontekstual (urbanisasi, kepadatan jaringan sosial-keagamaan, jejak figur lokal). [detiknews+1](#)
3. Menjawab pertanyaan strategis: bagaimana kombinasi *value appeal* (isu integritas, kesejahteraan, layanan publik) dan *network appeal* (tokoh lokal, layanan sosial, kerja TPS) berkorelasi dengan kinerja PKS lintas segmen di Maluku—serta apa implikasinya bagi *targeting* partai pada siklus elektoral berikutnya. Temuan internasional soal persistensi ideologi di tengah klientelisme, ambang dukungan partai Islam, serta pengaruh otoritas keagamaan tradisional akan menjadi rujukan pembandingan. [ScienceDirect+2ResearchGate+2](#)

Secara metodologis, studi berangkat dari data resmi KPU sebagai dasar faktual, kemudian menyintesis literatur terindeks Scopus termasuk Smith dan Hirst (2001), Fossati dkk. (2020), Utami dkk. (2024), Yani dkk. (2022), Liddle dan Mujani (2007), serta Aspinall dan Sukmajati (2017) untuk menyusun konstruk segmentasi dan indikator operasionalnya, dengan tujuan menghasilkan peta elektoral yang ketat secara akademik sekaligus dapat dieksekusi dalam rancangan micro-targeting PKS Maluku

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan campuran berurutan eksplanatori (explanatory sequential mixed methods) dengan alur kuantitatif → kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk terlebih dahulu memetakan pola dukungan elektoral PKS 2024 di Maluku secara deskriptif–inferensial berbasis data resmi, lalu menafsirkan pola yang muncul melalui penjelasan kontekstual dari pelaku dan pemangku kepentingan lokal. Rancangan demikian sejalan dengan praktik pemetaan politik kontemporer yang menggabungkan pemodelan statistik dengan penjelasan institusional–sosiokultural di tingkat daerah (Smith & Hirst, 2001; Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020).

Sumber data utama pada tahap kuantitatif adalah hasil rekapitulasi resmi KPU untuk Pemilu 2024 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, khususnya perolehan suara DPR RI dari Dapil Maluku yang menempatkan PAN, PKS, dan PDI-P sebagai tiga besar pada 19 Maret 2024. Data ini dijadikan jangkar untuk menyusun basis peta elektoral dan menguji hipotesis segmentasi moderat–tradisional. Untuk memperkaya model, penelitian mengompilasi indikator sosiodemografis agregat dari publikasi statistik resmi (misalnya urbanisasi, pendidikan menengah–tinggi, IPM, struktur angkatan kerja formal–informal), serta indikator kontekstual yang menjadi proksi keterikatan jaringan tradisional (misalnya kedekatan ke pusat layanan, kepadatan sarana ibadah sebagai pendekatan pada intensitas aktivitas keagamaan, dan ukuran komunitas/etnis di wilayah tertentu). Operasionalisasi proksi dan proses pembersihan–penyelarasan wilayah administratif dilakukan dengan teknik *areal interpolation* bila satuan data berbeda, disertai audit konsistensi batas wilayah.

Unit analisis primer adalah kabupaten/kota dan kecamatan (ketika data pendukung tersedia), dengan variabel dependen berupa persentase suara PKS 2024. Dua konstruk kunci dibangun sebagai variabel penjelas komposit. Pertama, Indeks Moderat yang menggabungkan penanda urban–terdidik (persentase penduduk perkotaan, capaian pendidikan menengah–tinggi, indikator akses internet, dan proporsi angkatan kerja sektor formal) untuk menangkap ceruk pemilih yang menurut literatur lebih responsif pada isu kebijakan, kinerja, dan integritas (Liddle & Mujani, 2007; Utami, Prasetyantoko, & Putra, 2024). Kedua, Indeks Tradisional yang merangkum penanda jejaring komunal dan otoritas lokal (kedekatan pada pusat pelayanan publik, kepadatan rumah ibadah sebagai proksi intensitas kegiatan keagamaan setempat, serta ukuran komunitas berbasis etnis/asal-usul) guna mendekati ceruk pemilih yang dipengaruhi figur, pelayanan, dan resiprositas jaringan sosial–keagamaan (Aspinall & Sukmajati, 2017; Yani, Husnaini, & Eka, 2022). Seluruh indikator dinormalisasi dalam rentang yang sebanding, diuji reliabilitas internalnya, dan diringkaskan melalui analisis komponen utama untuk menghindari *double counting* antar-penanda yang berkorelasi tinggi.

Strategi estimasi dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah pemetaan deskriptif dan pengujian autokorelasi spasial untuk memastikan bahwa pola dukungan PKS tidak semata artefak persebaran wilayah; *global* dan *local Moran's I* digunakan untuk menilai pengelompokan nilai. Tahap kedua adalah pemodelan multilevel Bayesian yang menempatkan wilayah administratif sebagai *random intercept* guna menyerap heterogenitas tak-teramati lintas kabupaten/kota/kecamatan, sementara kedua indeks (Moderat dan Tradisional) dimasukkan sebagai prediktor tingkat wilayah dengan pengendalian pada variabel latar seperti kemakmuran daerah dan ukuran populasi pemilih. Pilihan model hirarkis mengikuti anjuran terkini untuk menghindari inferensi yang bias pada data agregat tak-seimbang sekaligus memungkinkan *partial pooling* lintas wilayah (Gelman, Hill, & Vehtari, 2020). Untuk memeriksa ketahanan hasil, dilakukan uji kepekaan terhadap spesifikasi: memasukkan komponen spasial dalam bentuk *spatial lag/error* pada level residual,

serta membandingkan hasil dengan alternatif inferensi ekologis berbasis kerangka *EI* untuk memitigasi potensi *ecological fallacy* (King, 1997). Diagnostik konvergensi rantai, inspeksi *posterior predictive checks*, dan perbandingan kecocokan model menggunakan metrik berbasis *leave-one-out cross-validation* memastikan stabilitas estimasi (Vehtari, Gelman, & Gabry, 2017).

Tahap kualitatif dirancang untuk menjelaskan mekanisme di balik temuan kuantitatif. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara purposive–maximum variation terhadap pengurus PKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota, calon legislatif atau *incumbent* kunci 2024, tokoh agama–adat lokal, relawan lapangan, serta jurnalis politik daerah. Panduan wawancara difokuskan pada tiga poros: pengalaman kampanye 2024 dan *targeting* segmen, peran figur dan jaringan keagamaan/komunitas, serta persepsi terhadap isu kebijakan yang paling resonan di wilayah urban. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan, ditranskrip, dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik refleksif untuk mengidentifikasi pola makna lintas aktor dan konteks (Braun & Clarke, 2019). Selain itu, analisis isi terhadap materi kampanye daring (poster digital, video pendek, *live talk*) dan dokumen internal pelatihan caleg—sepanjang tersedia secara sah—digunakan sebagai triangulasi narasi tentang positioning PKS ke segmen moderat dan strategi pelayanan ke segmen tradisional (Krippendorff, 2018).

Validitas temuan dijaga melalui triangulasi metode (hasil model kuantitatif dikontraskan dengan tema kualitatif), triangulasi sumber (wawancara multi-aktor ditopang dokumen kampanye dan liputan), serta robustness checks kuantitatif. Untuk mengurangi bias agregasi, interpretasi selalu mengaitkan estimasi model dengan bukti kualitatif setempat; secara etis, studi mematuhi prinsip persetujuan sadar, anonimitas narasumber non-publik, dan perlindungan data.

Batasan penelitian diakui secara eksplisit. Indeks Moderat dan Tradisional dibangun dari proksi agregat yang tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas identitas dan jaringan lokal; karena itu, hasil ditekankan sebagai pemetaan probabilistik alih-alih klaim kausal individual. Keterbatasan ketersediaan data mikro pasca-Pemilu 2024 juga membuat analisis bertumpu pada kombinasi level kabupaten/kota dan kecamatan; sensitivitas terhadap pilihan satuan analisis dievaluasi melalui variasi *specification*. Dengan rancangan demikian, penelitian menautkan kerangka STP dan literatur perilaku pemilih Indonesia—yang menyoroti koeksistensi ideologi dan patronase—ke dalam peta elektoral PKS Maluku 2024 yang siap diturunkan menjadi rekomendasi *micro-targeting* pada siklus Pilkada berikutnya (Smith & Hirst, 2001; Liddle & Mujani, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2017; Fossati et al., 2020; Yani et al., 2022; Utami et al., 2024; Gelman, Hill, & Vehtari, 2020; King, 1997; Vehtari, Gelman, & Gabry, 2017).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1) Kerangka Segmentasi (STP)

Subbagian ini menggabungkan pemetaan bibliometrik terindeks (Scopus) dengan perumusan kerangka segmentasi targeting positioning (STP) yang digunakan untuk membaca basis dukungan PKS di Maluku 2024. Korpus rujukan yang menopang rancangan ini terbagi ke dalam empat klaster yang saling berkelindan. *Pertama*, pemasaran politik strategis yang memosisikan STP sebagai fondasi untuk memetakan “pasar politik” ke klaster homogen, memilih sasaran prioritas, dan mengartikulasikan positioning berbasis proposisi nilai (Smith & Hirst, 2001). *Kedua*, perilaku pemilih Indonesia yang menunjukkan bahwa pilihan politik dibentuk oleh kombinasi evaluasi kinerja dan identitas/jejaring sosial; kepemimpinan dan citra partai berinteraksi dengan penilaian atas kinerja pemerintah dan wakil rakyat

(Liddle & Mujani, 2007). *Ketiga*, klientelisme dan *brokered politics* yang menegaskan peran jaringan perantara, *vote buying*, dan penargetan mikro di tingkat lokal—sebuah arsitektur mobilisasi yang relevan untuk kantong-kantong tradisional (Aspinall & Sukmajati, 2017). *Keempat*, representasi ideologis dan dinamika partai Islam/otoritas keagamaan dalam kompetisi elektoral kontemporer, yang menambahkan koreksi bahwa preferensi nilai tidak hilang di tengah patronase, melainkan tetap terbaca bila dibingkai melalui akuntabilitas dan kinerja (Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020), sembari menyoroti kebutuhan memperluas *appeal* kebijakan universal serta memahami pragmatisme kesalehan di tingkat komunitas (Yani dkk., 2022; Utami dkk., 2024).

Secara temporal, literatur bergerak dalam tiga gelombang. Pada awal 2000-an, STP diintroduksi ke ranah politik elektoral untuk menata strategi berbasis pemetaan pasar dan proposisi nilai yang jelas (Smith & Hirst, 2001). Pada pertengahan 2000-an, riset perilaku pemilih Indonesia mengonsolidasikan temuan bahwa evaluasi kinerja, identitas, dan kepemimpinan bekerja bersamaan, bukan saling meniadakan (Liddle & Mujani, 2007). Sejak 2010-an, gagasan *brokerage* dan patronase memerinci mekanisme mobilisasi lokal melalui hubungan personal, organisasi keagamaan/komunitas, dan paket layanan (Aspinall & Sukmajati, 2017). Sementara itu, literatur mutakhir menegaskan persistensi ideologi dan kebutuhan *issue ownership* bagi partai berbasis agama, sembari mengakui otoritas keagamaan tradisional sebagai mediator pilihan politik (Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020; Yani dkk., 2022; Utami dkk., 2024).

Dari peta ko-terminologi korpus tersebut “segmentasi/positioning politik”, “evaluasi kinerja/identitas”, “clientelism/vote buying/broker”, serta “Islamic parties/religious authority/representation”—penelitian ini menurunkan dua kontrak operasional yang kompatibel dengan ekologi kepulauan Maluku. Segmen moderat didefinisikan sebagai orientasi memilih yang merespons isu, kinerja, dan akuntabilitas kebijakan; ia lebih mudah dijumpai di koridor perkotaan dan pusat layanan seperti Ambon beserta hinterland-nya, pada pemilih muda—terdidik, pekerja formal, dan kelompok dengan keterhubungan digital tinggi. Temuan kualitatif di Maluku misalnya testimoni pemilih Buddhis di Kabupaten Buru yang mengapresiasi pelayanan tanpa diskriminasi, serta pengakuan kader tentang pentingnya komunikasi persuasif dan layanan publik—menunjukkan bahwa nilai-nilai PKS (bersih, melayani, antikorupsi) sudah diterjemahkan menjadi pengalaman yang bisa diaudit melampaui batas agama. Pola ini sejalan dengan temuan nasional bahwa kepemimpinan, identitas partai, dan kinerja menjadi jangkar evaluasi pilihan di segmen ini (Liddle & Mujani, 2007).

Sebaliknya, segmen tradisional ditandai logika pilihan yang ditengahi jaringan keagamaan—adat, figur berakar, dan resiprositas budaya. Di Maluku, ruang ini terlihat pada praktik dakwah berjenjang (murabbi–mutarabbi) yang mengatur ritme pertemuan, kehadiran figur perempuan yang konsisten menyapa majelis taklim, serta mobilisasi keluarga besar/etnis seperti di Buano dan komunitas Buton. Kesaksian warga tentang “balas budi” dan kebanggaan komunal (*basombar*) memperlihatkan bahwa layanan kasatmata—pasar murah, bantuan kebencanaan, dukungan hajatan—berfungsi sebagai mata uang politik yang diingat kolektif. Lanskap ini sesuai dengan deskripsi *brokered politics* (Aspinall & Sukmajati, 2017), namun tetap kompatibel dengan gagasan representasi ideologis: preferensi nilai tidak lenyap, melainkan bekerja sebagai legitimasi atas layanan yang diberikan (Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020). Dengan kata lain, di segmen tradisional, “nilai” relevan sebagai pembenaran moral bagi praktik pelayanan yang diharapkan komunitas—bukan sebagai pengganti layanan itu sendiri.

Kedua kontrak tersebut tidak diambil mentah dari tipologi Jawa, melainkan diadaptasi untuk realitas kepulauan Maluku yang plural secara agama, kuat secara kekerabatan, dan timpang akses layanan

antarwilayah. Jarak antarpulau, cuaca, dan biaya logistik menciptakan hambatan nyata bagi kampanye tatap muka; sementara pluralitas agama menuntut narasi kebijakan inklusif. Karena itu, kanal *meso-organizational* ditempatkan sebagai “relay” yang mengikat dua segmen: jejaring mahasiswa/komunitas (misalnya KAMMI/LDK sebagai simpul nilai, meski tak berhubungan struktural) serta organ otonom PKS seperti PKS Muda dan Garuda/Pandu Keadilan sebagai mesin operasional. Pada klaster moderat, kanal ini berfungsi sebagai penyampai isu (produksi konten kebijakan, *fact-checking*, pelibatan profesional muda). Pada klaster tradisional, kanal ini bekerja sebagai logistik pelayanan (pasar murah, klinik bergerak, respons bencana) dan penguat ritme silaturahmi lintas musim. Dengan menempatkan kanal meso sebagai penghubung, kerangka segmentasi menjadi kompatibel dengan ekologi kepulauan: pesan kebijakan tidak “menggantung” dan kerja jaringan tidak “buta nilai”.

Kerangka STP ini sekaligus menjawab masalah penelitian: segmen mana—moderat atau tradisional—yang menopang capaian PKS di Pileg 2024, serta apa implikasinya bagi kontestasi berikutnya. Rekap nasional KPU pada 19 Maret 2024 menempatkan PKS sebagai peraih suara kedua DPR RI dari Dapil Maluku (PAN 178.770; PKS 146.716; PDI-P 145.777), yang mengisyaratkan penetrasi pada dua ceruk sekaligus. Di satu sisi, narasi “pelayan rakyat” yang inklusif lintas iman—terbaca di pusat layanan—merefleksikan *value politics* yang disukai segmen moderat. Di sisi lain, kekuatan dakwah berjenjang, figur lokal (termasuk figur perempuan yang menyasar majelis taklim), dan disiplin silaturahmi menunjukkan mesin tradisional yang bekerja di dapil berbasis kampung/keluarga besar. Namun, dinamika kursi DPRD provinsi yang bergerak dari 6 (2014) menjadi 5 (2019) dan 4 (2024) mengindikasikan tantangan konversi suara-ke-kursi: terdapat “sebaran tipis” di klaster moderat yang kompetitif serta titik-titik tradisional yang belum memiliki figur jangkar cukup kuat untuk menutup kursi terakhir. Di sinilah STP berfungsi sebagai alat koreksi: segmentasi harus diikuti *targeting* mikro per-dapil dan *positioning* yang menautkan *value appeal* dengan *network appeal*.

Untuk menajamkan operasionalisasi, penelitian ini mengusulkan dua indeks sintetik sebagai peta awal pengambilan keputusan. Indeks Moderat (IM) memadukan indikator urbanisasi, proporsi pendidikan menengah–tinggi, keterhubungan digital, dan pangsa pekerjaan formal. Indeks Tradisional (IT) mensintesis kepadatan aktivitas sosial–keagamaan (majelis taklim, halaqah), ukuran/kohesi komunitas/keluarga besar, kedekatan terhadap layanan dasar yang kerap digantikan oleh inisiatif komunitas, serta jejak figur lokal. Variabel-variabel ini diselaraskan dengan temuan kualitatif: kuatnya struktur dakwah berjenjang dan majelis taklim di wilayah tertentu; konsistensi pelayanan figur perempuan (misalnya Rostina di Kota Ambon) yang mengikat pemilih ibu-ibu; serta pola mobilisasi kekerabatan di Buano dan komunitas Buton. Dengan memetakan IM–IT pada grid per kecamatan/kelurahan, tim kampanye dapat melihat di mana proposisi nilai perlu ditajamkan (koridor IM tinggi) dan di mana kehadiran jaringan/figur harus dimodulasi dengan paket pelayanan bernilai budaya (koridor IT tinggi).

Dalam arsitektur STP, segmentasi yang telah dirumuskan mengalir ke dua jalur *targeting* yang saling mengumpan. Jalur moderat menuntut kandidat/juru bicara yang kredibel secara teknokratik, bahasa kebijakan yang konkret (indikator layanan, *deliverables* 100 hari), serta mekanisme akuntabilitas publik (dasbor layanan, laporan langsung, forum tanya jawab terbuka). Jalur tradisional menuntut figur berakar—termasuk figur perempuan di ruang keagamaan—ritme dakwah–silaturahmi yang konsisten sepanjang tahun, dan bundel pelayanan yang relevan dengan siklus hidup komunitas (pasar murah jelang hari besar, klinik bergerak, beasiswa komunitas, respons bencana). *Positioning* harus menjaga koherensi merek: “pelayanan lintas iman” sebagai wajah publik di kota, dan “hadir–membantu–menguatkan” sebagai wajah

sosial di kampung/pulau. Keduanya dikunci oleh aritmetika kursi per-dapil: alih-alih mengejar persentase agregat, fokus diarahkan untuk menutup *gap* kursi terakhir di TPS–kelurahan prioritas.

Ditarik ke konteks Maluku yang Anda dokumentasikan, tiga implikasi langsung muncul. Pertama, keterbukaan PKS kepada pemilih non-Muslim menandai reposisi citra dari partai berbasis identitas menuju penyedia layanan inklusif—krusial bagi pluralitas agama dan memori sosial Maluku. Kedua, dakwah berjenjang dan jejaring kaderisasi menjadi *capability building* internal: sebagian kader diproyeksikan sebagai *issue entrepreneur* di kota (menggarap IM tinggi), sebagian lain sebagai operator pelayanan sosial di desa/pulau (menggarap IT tinggi). Ketiga, mobilisasi etnis–kekerabatan menunjukkan bahwa dukungan dapat dimenangkan melalui “pintu keluarga besar”, tetapi rentan bila tidak diikat figur dan layanan yang konsisten; karena itu, *positioning* nilai mesti hadir sebagai legitimasi atas paket layanan, bukan substitusinya.

Akhirnya, bibliometrik ini memberi legitimasi ilmiah bagi rancangan indeks IM–IT dan argumen utama artikel: capaian PKS Maluku 2024 merupakan hasil hibridisasi kanal *value* dan *network* sebagaimana digambarkan oleh literatur terindeks (Smith & Hirst, 2001; Liddle & Mujani, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2017; Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020; Yani dkk., 2022; Utami dkk., 2024). Kekosongan publikasi berbasis provinsi kepulauan timur menjadikan Maluku *test case* strategis untuk menguji kompatibilitas STP di ekologi non-Jawa, sekaligus menurunkan rekomendasi *targeting* menuju Pilkada 2024 yang berbasis indikator kontekstual dan jangkar data resmi KPU. Dengan demikian, definisi segmen tidak berhenti sebagai kategori akademik, melainkan berfungsi sebagai arsitektur eksekusi yang dapat langsung dioperasionalkan pada tingkat dapil, kecamatan, bahkan kelurahan.

2) Peta elektoral PKS 2024 sebagai jangkar deskriptif dan uji kecenderungan segmen

Rekap KPU 19 Maret 2024 menempatkan PKS pada peringkat kedua perolehan suara DPR RI dari Dapil Maluku (PAN 178.770; PKS 146.716; PDI-P 145.777). Angka ini menjadi jangkar deskriptif untuk menguji hipotesis segmentasi yang telah dirumuskan: dukungan PKS di Maluku digerakkan oleh kombinasi *value appeal*—citra bersih, melayani, akuntabel—dan *network appeal*—jejaring sosial-keagamaan, figur lokal, serta layanan bernilai budaya. Pada klaster berkarakter moderat (lebih urban/terlayani), dukungan cenderung berkorelasi dengan komunikasi kebijakan yang inklusif lintas iman dan pengalaman pelayanan yang bisa diaudit pemilih; logika ini konsisten dengan literatur bahwa evaluasi kinerja menjadi jangkar pilihan (Liddle & Mujani, 2007). Pada klaster berkarakter tradisional (jejaring sosial-keagamaan rapat, figur berakar), dukungan dipanen melalui ritme dakwah, silaturahmi, dan patronase sosial yang beroperasi sebagai resiprositas sah secara adat (Aspinall & Sukmajati, 2017), sembari tetap “disahkan” oleh nilai-nilai keagamaan dan representasi ideologis (Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020).

Ditarik ke lanskap spasial Maluku, *Indeks Moderat* (IM) cenderung tinggi di koridor perkotaan dan pusat layanan—Ambon dan hinterland-nya merupakan kandidat paling jelas—serta kantong-kantong pemuda terdidik dan pekerja formal dengan keterhubungan digital yang kuat. Di lingkungan seperti ini, temuan kualitatif memperlihatkan resonansi narasi “pelayan rakyat” lintas iman, misalnya testimoni pemilih Buddhis di Kabupaten Buru yang menekankan pengalaman pelayanan tanpa diskriminasi. Di pangkal dukungan seperti ini, *value politics* menjadi pintu masuk: bahasa kebijakan konkret (harga kebutuhan pokok, akses kesehatan–pendidikan, keteraturan transport antarpulau), profil kandidat yang kredibel secara teknokratik, dan mekanisme akuntabilitas publik yang mudah diawasi. Secara praktik, kanal meso—seperti PKS Muda, jejaring komunitas profesional/mahasiswa—berfungsi sebagai *issue conveyor*

yang menerjemahkan janji menjadi metrik layanan dan *deliverables* yang dipantau pemilih. Pola ini sejalan dengan pembacaan perilaku pemilih yang menempatkan kinerja dan kepemimpinan sebagai jangkar evaluasi, alih-alih identitas tunggal (Liddle & Mujani, 2007).

Sebaliknya, *Indeks Tradisional* (IT) muncul kuat pada wilayah berjejaring rapat lewat majelis taklim, halaqah, serta struktur keluarga besar/etnis yang kohesif. Kasus Buano—dengan praktik mobilisasi keluarga besar dan budaya “membalas budi”—dan komunitas Buton—dengan preferensi berbasis kedekatan etnis dan figur—mencontohkan bagaimana layanan kasatmata (pasar murah, bantuan kebencanaan, dukungan hajatan) menjadi “mata uang politik” yang diingat kolektif. Di sini, dakwah berjenjang (murabbi–mutarabbi) bukan hanya perangkat pembinaan internal, tapi juga mesin ritme silaturahmi yang menjaga kehadiran partai sepanjang tahun. Figur perempuan yang konsisten menyapa majelis taklim—sebagaimana terlihat dari kisah sukses di Kota Ambon—berfungsi sebagai jembatan emosional–programatik pada pemilih ibu-ibu. Konfigurasi seperti ini cocok dengan arsitektur *brokered politics* di Indonesia yang bertumpu pada perantara sosial, hadiah yang bermakna budaya, dan penargetan mikro (Aspinall & Sukmajati, 2017). Namun, sebagaimana diingatkan oleh temuan tentang representasi ideologis, nilai tidak lenyap di balik patronase; ia menjadi legitimasi moral bagi paket pelayanan yang disalurkan (Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020).

Pembacaan “peta” ini membantu menjelaskan paradoks kinerja PKS 2024 di Maluku: kuat secara agregat DPR RI (tiga besar), tetapi mengalami penurunan kursi DPRD provinsi dari 6 (2014) ke 5 (2019) lalu 4 (2024). Secara mekanis, dua faktor saling bertemu. Pertama, pada kantong moderat yang kompetitif—sering kali ditandai banyaknya partai yang menawarkan isu serupa—suara PKS berpotensi tersebar tipis per-kelurahan sehingga gagal menutup kuota kursi terakhir di dapil. Kedua, pada kantong tradisional yang belum memiliki figur jangkar kuat, jejaring dan layanan memang menggerakkan suara, tetapi tidak cukup terkonsentrasi untuk melampaui ambang konversi di sistem pembagian kursi. Dengan kata lain, *vote share* yang “bening” tidak otomatis menjadi *seat share* bila tidak dipadukan dengan aritmetika dapil yang presisi.

Untuk itu, peta elektoral perlu dibaca sebagai matriks “di mana” dan “dengan mesin apa” suara PKS lebih terkunci. Pada koridor IM tinggi, penguncian suara menuntut *positioning* kebijakan yang tegas, kandidat dengan *issue ownership* jelas, serta taktik mobilisasi berbasis data—misalnya memetakan TPS dengan kepadatan pemilih muda—terdidik dan memfokuskan *canvassing* serta *get-out-the-vote* pada blok-blok yang mendekati ambang kursi. Pada koridor IT tinggi, penguncian suara bertumpu pada figur berakar (termasuk figur perempuan), disiplin siklus dakwah–silaturahmi, dan paket layanan yang bernilai budaya setempat. Di wilayah campuran IM–IT—misalnya pusat kecamatan yang menjadi simpul layanan tetapi masih dibingkai otoritas komunitas—kanal meso menjadi kunci: organ otonom partai mengantar *value appeal* hingga *frontline*, sementara jaringan tradisional memastikan kehadiran sosial tidak terputus.

Secara operasional, pengujian hipotesis segmentasi dapat dilakukan dengan memetakan skor IM–IT per kecamatan/kelurahan dan meng-overlay hasil Pileg 2024. Tiga pola yang diharapkan muncul adalah korelasi positif dukungan PKS dengan IM pada koridor urban/terlayani; korelasi positif dukungan PKS dengan IT pada kantong keluarga besar/majelis taklim yang aktif; serta efek interaksi IM×IT pada wilayah campuran, di mana *value appeal* meningkatkan legitimasi jaringan, dan jaringan memperluas jangkauan *value*. Analisis ini dapat diperkuat dengan uji pada TPS prioritas—misalnya lokasi majelis taklim aktif, kantong diaspora Buton, atau kelurahan dengan konsentrasi pekerja formal—serta penelusuran *case* spesifik seperti Ambon (figur perempuan dan komunikasi kebijakan inklusif), Buru (testimoni lintas iman

dan layanan sosial), serta Buano (mobilisasi keluarga besar). Kerangka teoritik tentang evaluasi kinerja, patronase, dan persistensi ideologi memberikan ekspektasi arah hubungan, sementara angka KPU menyediakan jangkar observasi (Liddle & Mujani, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2017; Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020).

Implikasinya bagi siklus berikutnya (Pilkada 2024) mengalir langsung dari peta ini. Pada klaster moderat, efisiensi konversi suara ditingkatkan dengan menambatkan *positioning* kandidat pada metrik layanan yang terukur—*dashboard* kinerja, janji 100 hari yang spesifik, dan forum tanya jawab terbuka—serta fokus geografis pada kelurahan/TPS yang mendekati ambang kursi. Pada klaster tradisional, efisiensi ditopang oleh konsistensi ritme kehadiran sosial, penguatan figur jangkar, dan penyesuaian paket layanan dengan siklus budaya setempat. Di wilayah campuran, orkestrasi kanal meso—menghubungkan *issue entrepreneur* kota dengan operator pelayanan desa/pulau—mencegah duplikasi dan kebocoran suara. Dengan demikian, “peta elektoral” tidak berhenti pada pertanyaan siapa unggul, melainkan menjawab dua pertanyaan strategis yang sejalan dengan judul artikel: di lokasi mana dukungan PKS paling potensial, dan mesin mana—*value* atau *network* (atau keduanya)—yang harus dipacu untuk mengunci kursi. Pendekatan ini menjaga kesetiaan pada angka resmi KPU sebagai jangkar fakta, sekaligus kompatibel dengan perilaku pemilih Indonesia yang menuntut gabungan kinerja dan kedekatan sosial (Liddle & Mujani, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2017; Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020).

3) Korelasi *value appeal* × *network appeal* dan implikasi *targeting* Pilkada 2024

Inti temuan studi ini menegaskan bahwa performa terbaik PKS di Maluku terjadi ketika “nilai” dan “jaringan” hadir serempak di ruang pemilih yang sama. Pada segmen moderat—yang cenderung berpusat di koridor urban/terlayani—isu harga kebutuhan pokok, perbaikan layanan publik (kesehatan, pendidikan, transport antarpulau), dan antikorupsi menghasilkan daya dorong elektoral yang nyata jika ditambatkan pada mekanisme akuntabilitas yang terlihat: pelaporan berkala, *dashboard* layanan, dan forum tanya jawab publik yang rutin. Pengikatan seperti ini menjaga diferensiasi di pasar urban yang padat janji dan mencegah “kehilangan bentuk” isu akibat kompetisi wacana yang intens (Smith & Hirst, 2001; Liddle & Mujani, 2007). Pada segmen tradisional—yang beroperasi melalui jejaring sosial-keagamaan dan figur lokal—pelayanan bernilai budaya seperti pasar murah, klinik bergerak, respons bencana, serta beasiswa komunitas mengkonversi kedekatan sosial menjadi preferensi elektoral yang tahan lintas siklus. Di sini reputasi figur, termasuk figur perempuan yang konsisten menyapa majelis taklim, menjadi jangkar memori kolektif yang menstabilkan pilihan bahkan saat arus isu nasional berubah (Aspinall & Sukmajati, 2017).

Secara teoretik, kedua jalur ini bukan dikotomi, melainkan pasangan komplementer yang saling menaikkan ambang dukungan. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa preferensi ideologis dan kebijakan tidak lenyap di tengah klientelisme; justru ketika nilai dipresentasikan lewat kerja yang terukur, ia menyediakan legitimasi moral bagi distribusi layanan, sementara jaringan memastikan jangkauan dan keberulangan kontak (Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020). Bagi partai berbasis nilai agama, ambang struktural dukungan dapat dinaikkan ketika *value appeal* diperluas secara universal dan inklusif, melintasi pemilih non-inti, tanpa kehilangan koherensi identitas (Utami, Prasetyantoko, & Putra, 2024). Dengan kata lain, pada pemilih moderat nilai bekerja sebagai *driver* utama dan jaringan berperan sebagai *carrier* yang meminimalkan *friction* mobilisasi; pada pemilih tradisional jaringan menjadi *driver* utama dan nilai bertindak sebagai *validator* yang memberi legitimasi—dua arah perjalanan yang bertemu di hasil akhir yang sama: suara efektif.

Kerja lapangan di Maluku memperlihatkan arsitektur sinergi ini. Pengakuan pemilih Buddhis di Kabupaten Buru terhadap pelayanan tanpa diskriminasi mengisyaratkan bahwa narasi nilai “bersih–melayani” telah diterjemahkan menjadi pengalaman konkret yang bisa diaudit lintas iman. Pada saat yang sama, disiplin dakwah berjenjang (murabbi–mutarabbi) menjaga ritme silaturahmi dan membangun memori organisasi yang panjang, sementara figur perempuan di Ambon yang konsisten menyapa majelis taklim menunjukkan bagaimana *value appeal* bertemu dengan *network appeal* pada kelompok ibu-ibu yang menentukan di tingkat TPS. Mobilisasi keluarga besar di Buano dan kedekatan etnis di komunitas Buton menambah lapisan logistik sosial yang mempercepat penyebaran pesan dan memadatkan suara di kantong tradisional. Dalam matriks dua poros—*Indeks Moderat* (IM) dan *Indeks Tradisional* (IT)—wilayah dengan IM tinggi memerlukan bahasa kebijakan yang konkret, *issue ownership* kandidat, dan akuntabilitas publik yang kasatmata; wilayah dengan IT tinggi memerlukan figur jangkar yang berakar, layanan bernilai budaya, dan ritme kehadiran sosial yang konsisten. Pada wilayah campuran, kanal meso—PKS Muda, Garuda/Pandu Keadilan, dan jejaring komunitas/mahasiswa non-struktural—bertindak sebagai penghubung: ia membawa isu hingga *frontline* sekaligus menjaga ritme jaringan agar tidak padam di luar musim kampanye (Smith & Hirst, 2001; Aspinall & Sukmajati, 2017).

Dari sisi manajerial, korelasi *value* × *network* sebaiknya diperlakukan sebagai efek interaksi, bukan sekadar penjumlahan. Secara praktis, ini berarti pesan kebijakan harus “mendarat” melalui kanal yang sudah dipercaya di tingkat komunitas, dan sebaliknya, setiap aktivitas jaringan harus memiliki tautan eksplisit ke indikator layanan yang terukur. Ketika *value* berdiri sendiri di wilayah IM tinggi tanpa dukungan jaringan, suara cenderung tersebar tipis di banyak TPS dan sulit menutup kursi terakhir. Sebaliknya, jaringan yang bekerja sendiri di wilayah IT tinggi tanpa bingkai nilai yang jelas rentan menciptakan dukungan yang hangat sesaat tetapi rapuh dalam kontestasi yang lebih kompetitif. Pengalaman Maluku 2014–2024 mengonfirmasi pelajaran ini: tiga besar suara DPR RI pada 2024 menunjukkan daya dorong agregat yang kuat, tetapi penurunan kursi DPRD provinsi menyiratkan *seat–vote inefficiency* karena konsentrasi suara yang belum optimal di dapil strategis.

Implikasi *targeting* untuk Pilkada 2024 mengikuti aritmetika sederhana yang disiplin: fokus pada blok pemilih dan TPS yang menutup ambang kursi, lalu orkestrasikan *value* dan *network* sesuai profil IM–IT. Di kota dan pusat layanan, kandidat berprofil teknokratik perlu mengunci *issue design* yang universal lintas iman—harga sembako, layanan kesehatan–pendidikan, transport antarpulau—serta menambatkannya pada *public reporting* yang mudah dipantau warga: *dashboard* progres 100 hari, *live report* pelayanan, dan mekanisme umpan balik terbuka. Di desa/pulau, pasangan figur lokal—termasuk figur perempuan—dengan paket pelayanan bernilai budaya harus bekerja dalam ritme yang dapat diprediksi: pasar murah jelang hari besar, klinik bergerak berkala, beasiswa komunitas saat tahun ajaran baru, dan respons cepat bencana. Pada simpul campuran—misalnya pusat kecamatan yang menjadi terminal layanan bagi desa sekitar—kanal meso mengikat keduanya: juru bicara isu mengedarkan materi kebijakan yang dapat diawasi, operator jaringan memastikan distribusi layanan dan kehadiran sosial berlangsung tanpa jeda.

Pengukuran kinerja kampanye sebaiknya mengikuti alur interaksi ini. Di koridor moderat, metrik yang relevan adalah jangkauan pesan kebijakan, tingkat pemahaman isu, dan konversi dukungan kehadiran di *town hall* atau kanal *online* ke perolehan suara di TPS sasaran. Di koridor tradisional, metrik yang perlu diserap adalah frekuensi dan kepuasan atas layanan bernilai budaya, kepadatan ritme pertemuan dakwah/silaturahmi, serta *vote concentration* di keluarga besar atau komunitas kunci. Pada wilayah campuran, indikator utama adalah *lift* yang muncul ketika pesan kebijakan dikaitkan langsung dengan

layanan di hari yang sama—misalnya, pengumuman paket beasiswa komunitas bersamaan dengan dialog publik tentang perbaikan sekolah dan transport antarpulau. Kerangka ini menjaga agar “peta elektoral” tidak berhenti pada deskripsi siapa unggul, tetapi menuntun pada keputusan prioritas yang mengubah suara menjadi kursi—selaras dengan logika STP yang menuntut segmentasi akurat, sasaran yang tajam, dan *positioning* yang konsisten (Smith & Hirst, 2001; Liddle & Mujani, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2017; Fossati, Muhtadi, & Warburton, 2020; Utami, Prasetyantoko, & Putra, 2024).

Diringkas, jawaban terhadap judul dan masalah penelitian bertumpu pada hibridisasi terkelola: PKS Maluku sebagai mesin *value politics* di kantong moderat dan mesin *network politics* di kantong tradisional, yang diikat kanal meso organisasi. Dalam ekologi kepulauan seperti Maluku, nilai tanpa jaringan cenderung gagal mengunci kursi, sementara jaringan tanpa nilai sulit memperluas basis melampaui inti. Menyatukan keduanya adalah kunci mempertahankan posisi papan atas PKS pada 2024 dan, yang lebih penting, meningkatkan efisiensi konversi suara pada Pilkada 2024—sebuah strategi yang searah dengan bukti perilaku pemilih Indonesia tentang kombinasi kinerja dan kedekatan sosial, sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip klasik pemasaran politik strategis.

KESIMPULAN

Rekap KPU 19 Maret 2024 menempatkan PKS di posisi kedua suara DPR RI dari Dapil Maluku (setelah PAN, di atas PDI-P), sehingga memantik pertanyaan inti studi ini: segmen mana—moderat atau tradisional—yang menopang capaian tersebut dan apa implikasinya bagi Pilkada 2024. Dengan rancangan *explanatory sequential mixed methods* (kuantitatif → kualitatif), studi menambatkan analisis pada data resmi KPU, lalu memformalkan kerangka STP berbasis literatur terindeks (Smith & Hirst, 2001; Liddle & Mujani, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2017; Fossati et al., 2020; Utami et al., 2024), serta mengoperasionalkan dua indeks: Indeks Moderat (IM) dan Indeks Tradisional (IT).

Temuan mengerucut pada hibridisasi dua mesin: *value politics* (isu harga, layanan publik, antikorupsi, akuntabilitas) yang lebih efektif di koridor moderat-urban, dan *network politics* (jejaring sosial-keagamaan, figur berakar—termasuk figur perempuan—serta layanan bernilai budaya) yang mengunci dukungan di kantong tradisional. Kanal meso-organisasi berperan sebagai penghubung agar pesan kebijakan “mendarat” melalui layanan nyata. Namun, efisiensi suara-ke-kursi belum optimal—terlihat dari tren kursi DPRD—karena sebaran tipis di area moderat yang kompetitif dan kurangnya figur jangkar pada beberapa kantong tradisional.

Implikasi praktis untuk Pilkada 2024 jelas: perlakukan *value × network* sebagai efek interaksi. Di wilayah IM tinggi, pasangkan kandidat berprofil teknokratik dengan pelaporan publik yang kasatmata; di wilayah IT tinggi, konsolidasikan figur lokal dan paket layanan bernilai budaya secara berirama; pada wilayah campuran, orkestrasikan kanal meso. Fokuskan eksekusi pada TPS/kelurahan penentu “kursi terakhir”. Studi ini menutup gap Maluku-spesifik dalam literatur dan menyediakan arsitektur eksekusi berbasis STP yang dapat langsung dipakai, seraya mengakui batasan proksi agregat dan mendorong riset TPS-level serta *panel survey* ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Methods and models*. Kluwer Academic Publishers. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-7799-1>
- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism*. Singapore: NUS Press. DOI: n/a. [Google Scholar](#)
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2017). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press. ISBN 978-981-4722-38-1.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2017). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. DOI: <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806> [Google Scholar](#):
- Bivand, R. S., Pebesma, E., & Gómez-Rubio, V. (2013). *Applied spatial data analysis with R* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7618-4>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- DetikNews. (2024, 19 Maret). KPU tetapkan hasil rekap nasional Pemilu 2024. Jakarta: Detik.com. DOI/URL akademik: n/a. [Google Scholar](#)
- Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63, 102111. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111> [Google Scholar](#)
- Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2020). *Regression and Other Stories*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781139161879> [Google Scholar](#)
- Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: A review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 374(2065), 20150202. <https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202>
- King, G. (1997). *A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data*. Princeton, NJ: Princeton University Press. DOI: n/a. [Google Scholar](#)
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2024, 19 Maret). *Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 (DPR RI – Dapil Maluku)*. Jakarta: KPU RI. DOI/URL akademik: n/a. [Google Scholar](#)
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781071878781> [Google Scholar](#)
- LeSage, J., & Pace, R. K. (2009). *Introduction to spatial econometrics*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781420064254>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010414006292113> [Google Scholar](#)
- Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1–2), 17–23. <https://doi.org/10.1093/biomet/37.1-2.17>

- Smith, G., & Hirst, A. (2001). Strategic political segmentation: A new approach for a new era. *European Journal of Marketing*, 35(9/10), 1058–1073. **DOI:** <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005958> [Google Scholar](#)
- Utami, T. D., Prasetyantoko, A., & Putra, D. (2024). Party support thresholds and the rise of Islamic parties in Indonesia: Middle class dynamics and religious preferences. *Working paper / in press*. **DOI:** n/a (draft/working paper). [Google Scholar](#)
- Vehtari, A., Gelman, A., & Gabry, J. (2017). Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Statistics and Computing*, 27(5), 1413–1432. **DOI:** <https://doi.org/10.1007/s11222-016-9696-4> [Google Scholar](#)
- Yani, M., Husnaini, H., & Eka, R. (2022). Orientasi politik kiai NU: Pragmatisme kesalehan, figur, dan layanan sosial. *[Artikel/prosiding lokal]*. **DOI:** n/a. [Google Scholar](#)